

**CATATAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumberdaya. Laporan Keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Tujuan Laporan Keuangan Pemerintah disusun untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

- a. menyajikan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- b. menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
- c. menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- d. menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan masyarakat;
- e. menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
- f. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Daerah, mengenai kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan pemerintah daerah menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana, dan arus kas pemerintah daerah.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Keuangan Pemerintah Daerah. Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, Dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076);

17. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 13);
20. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 9);
21. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 120 Tahun 2014 tentang Pedoman Kapitalisasi Barang Milik Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 123);
22. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 98 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Persediaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 100);
23. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Inventarisasi Barang Milik Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 32);
24. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);
25. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 56 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Penilaian Barang Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 56) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 56 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Penilaian Barang Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 46);
26. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 57);

27. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 86 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 87) sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 86 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 30);
28. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 113 Tahun 2020 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 113) sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 113 Tahun 2020 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 33);
29. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 71 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 71);
30. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 104 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 104);
31. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 44 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 44) sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 44 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 53).

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD

Bab II Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

2.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Bab III Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan SKPD

3.1. Rincian dan Penjelasan Pos-Pos Pelaporan Keuangan SKPD

3.1.1. Pendapatan-LRA

3.1.2. Belanja

3.1.3. Aset

3.1.4. Kewajiban

3.1.5. Ekuitas

3.1.6. Pendapatan-LO

3.1.7. Beban

3.1.8. Laporan Perubahan Ekuitas

Bab IV. Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan

Bab V. Penutup

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Dinas Pariwisata DIY

Kode Rekening	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Berlebih/ (berkurang)	Persen (%)
1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	2.084.488.000	1.984.011.820	100.476.180	95,18
1.03.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	2.084.488.000	1.984.011.820	100.476.180	95,18
1.03.13.5.02.03	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	1.000.000.000	946.822.070	53.177.930	94,68
1.03.13.5.02.04	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	600.000.000	597.035.000	2.965.000	99,51
1.03.13.5.02.08	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Merapi	484.488.000	440.154.750	44.333.250	90,85
2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	24.456.775.369	24.167.009.272	289.766.097	98,82
2.22.08.5.04	Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	1.267.270.833	1.219.669.960	47.600.873	96,24
2.22.08.5.04.03	Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia	1.267.270.833	1.219.669.960	47.600.873	96,24
2.22.08.5.06	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	2.858.753.536	2.795.212.600	63.540.936	97,78
2.22.08.5.06.01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	2.858.753.536	2.795.212.600	63.540.936	97,78
2.22.08.5.08	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	14.556.691.300	14.442.555.224	114.136.076	99,22
2.22.08.5.08.02	Pengembangan Atraksi Wisata Budaya	14.556.691.300	14.442.555.224	114.136.076	99,22
2.22.08.5.09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	5.774.059.700	5.709.571.488	64.488.212	98,88
2.22.08.5.09.18	Peningkatan Lembaga Wisata Budaya	5.774.059.700	5.709.571.488	64.488.212	98,88
3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	9.899.560.744	9.669.246.250	230.314.494	97,67
3.26.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	73.000.000	68.761.699	4.238.301	94,19
3.26.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	48.000.000	44.506.051	3.493.949	92,72
3.26.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	10.000.000	9.883.254	116.746	98,83
3.26.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.000.000	14.372.394	627.606	95,82
3.26.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.643.459.861	8.473.389.832	170.070.029	98,03
3.26.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.590.459.861	8.420.741.931	169.717.930	98,02
3.26.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	37.500.000	37.150.000	350.000	99,07
3.26.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.000.000	2.000.000	-	100,00
3.26.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	13.500.000	13.497.901	2.099	99,98
3.26.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	28.800.000	24.868.924	3.931.076	86,35
3.26.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12.000.000	8.068.924	3.931.076	67,24
3.26.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	16.800.000	16.800.000	-	100,00

3.26.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	233.506.100	231.750.808	1.755.292	99,25
3.26.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.992.000	9.945.000	47.000	99,53
3.26.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40.355.100	40.211.165	143.935	99,64
3.26.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.000.000	5.985.500	14.500	99,76
3.26.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.005.000	24.998.600	6.400	99,97
3.26.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	6.012.000	6.012.000	-	100,00
3.26.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	115.392.000	114.528.543	863.457	99,25
3.26.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	30.750.000	30.070.000	680.000	97,79
3.26.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	30.119.000	29.371.000	748.000	97,52
3.26.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.119.000	13.387.000	732.000	94,82
3.26.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	16.000.000	15.984.000	16.000	99,90
3.26.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	619.605.183	614.676.887	4.928.296	99,20
3.26.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.001.000	10.001.000	-	100,00
3.26.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	143.147.383	138.639.087	4.508.296	96,85
3.26.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	466.456.800	466.036.800	420.000	99,91
3.26.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	271.070.600	226.427.100	44.643.500	83,53
3.26.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	30.269.500	16.240.900	14.028.600	53,65
3.26.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	181.695.600	151.273.700	30.421.900	83,26
3.26.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.855.500	13.800.500	55.000	99,60
3.26.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.000.000	29.862.000	138.000	99,54
3.26.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.250.000	15.250.000	-	100,00
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	149.999.900	148.230.000	1.769.900	98,82
3.26.02.1.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	99.999.900	98.491.200	1.508.700	98,49
3.26.02.1.03.02	Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	99.999.900	98.491.200	1.508.700	98,49
3.26.02.1.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	50.000.000	49.738.800	261.200	99,48
3.26.02.1.04.04	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	50.000.000	49.738.800	261.200	99,48
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	419.999.600	402.210.100	17.789.500	95,76
3.26.03.1.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	419.999.600	402.210.100	17.789.500	95,76
3.26.03.1.01.01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	100.000.000	96.504.500	3.495.500	96,50
3.26.03.1.01.03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri	99.999.600	99.412.500	587.100	99,41
3.26.03.1.01.04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	220.000.000	206.293.100	13.706.900	93,77
3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	194.999.800	194.979.000	20.800	99,99

3.26.04.1.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	179.999.900	179.979.100	20.800	99,99
3.26.04.1.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	179.999.900	179.979.100	20.800	99,99
3.26.04.1.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	14.999.900	14.999.900	-	100,00
3.26.04.1.02.10	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	14.999.900	14.999.900	-	100,00
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	1.371.500.000	1.362.241.338	9.258.662	99,32
3.26.05.1.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	1.371.500.000	1.362.241.338	9.258.662	99,32
3.26.05.1.01.01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	590.000.000	589.899.294	100.706	99,98
3.26.05.1.01.03	Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (Tour Guide) Tingkat Lanjutan	435.000.000	426.911.544	8.088.456	98,14
3.26.05.1.01.04	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	346.500.000	345.430.500	1.069.500	99,69
	JUMLAH	38.577.323.413	37.927.927.780	649.395.633	98,32

2.2. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Pendapatan Dinas Pariwisata DIY dianggarkan sebesar Rp0,00 dengan realisasi sebesar Rp530.250.000,00 atau 0 persen. Belanja dianggarkan sebesar Rp38.577.323.413,00 dan realisasi sebesar Rp37.927.927.780,00 atau 98,32 persen. Pendapatan tahun 2023 melebihi target anggaran yang ditetapkan.

Secara umum kinerja dapat dicapai dengan baik, dan tidak ada kendala yang material yang dihadapi oleh Dinas Pariwisata DIY.

BAB III

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

3.1. Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan SKPD

	2023	2022 (Audited)
3.1.1 <u>Pendapatan-LRA</u>	<u>Rp530.250.000,00</u>	<u>Rp528.200.926,00</u>

Pendapatan-LRA Dinas Pariwisata DIY Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp0,00 dan realisasi sebesar Rp530.250.000,00 (100,00%) atau naik sebesar 0,39% dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp528.200.926,00. Rincian Pendapatan-LRA Dinas Pariwisata DIY tahun 2023 adalah berikut:

3.1.1.1 <u>Pendapatan Asli Daerah- LRA</u>	<u>Rp530.250.000,00</u>	<u>Rp528.200.926,00</u>
---	--------------------------------	--------------------------------

Pendapatan-LRA Dinas Pariwisata DIY Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp0,00 dan realisasi sebesar Rp530.250.000,00 (0,00%) atau naik sebesar 0,39% dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp528.200.926,00 dengan rincian berikut:

Tabel III.1

Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah-LRA

No	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	Retribusi Daerah-LRA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Lain-lain PAD yang Sah-LRA	0,00	530.250.000,00	0,00	528.200.926,00
	Jumlah	0,00	530.250.000,00	0,00	528.200.926,00

3.1.1.1.1 <u>Retribusi Daerah- LRA</u>	<u>Rp0,00</u>	<u>Rp0,00</u>
---	----------------------	----------------------

Pendapatan Retribusi Daerah- LRA Dinas Pariwisata DIY Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp0,00 direalisasikan sebesar Rp0,00 (0,00%) tidak mengalami kenaikan/penurunan dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp0,00.

Tabel III.2

Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah

No	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00

Lain-lain Pendapatan Asli

Rp530.250.000,00

Rp528.200.926,00

3.1.1.1.2 Daerah Yang Sah -LRA

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-LRA Dinas Pariwisata DIY Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp0,00, direalisasikan sebesar Rp530.250.000,00 (0,00%) atau naik sebesar 1,26% dibandingkan dengan realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-LRA tahun 2022 sebesar Rp528.200.926,00. Rincian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-LRA tahun 2023 adalah berikut:

Tabel III.3

Rincian Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

No	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Hasil Sewa BMD	0,00	530.250.000,00	0,00	523.666.666,00
2	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	0,00	0,00	0,00	4.534.260,00
	Jumlah	0,00	530.250.000,00	0,00	528.200.926,00

Hasil Sewa BMD Dinas Pariwisata DIY Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp530.250.000,00 dirinci sebagai berikut:

Tabel III.4

Rincian Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

NO	LOKASI	KETERANGAN	NOMOR PERJANJIAN	PERIODE SEWA	NILAI SEWA (Rp)
1	Parkir Candi Ratu Boko	Sewa lahan parkir selama 5 (lima) tahun oleh PT. TWC BPRB	934/12896	01/01/2024 s.d. 31/12/2028	530.250.000,00
	JUMLAH				530.250.000,00

Realisasi Hasil Sewa BMD Dinas Pariwisata DIY Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp530.250.000,00 merupakan pendapatan sewa lahan parkir Candi Ratu Boko selama 5 (lima) tahun dengan masa berlaku terhitung mulai 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2028. Pendapatan tersebut telah disetorkan ke Kas Daerah pada bulan Desember 2023.

	2023	2022 (Audited)
3.1.2. Belanja	<u>Rp37.927.927.780,00</u>	<u>Rp37.886.286.085,00</u>

Belanja Dinas Pariwisata DIY Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp38.577.323.413,00 dengan realisasi sebesar Rp37.927.927.780,00 atau 98,32% dengan rincian berikut:

3.1.2.1 Belanja Operasi **Rp35.201.918.780,00** **Rp37.668.849.086,00**

Belanja Operasi Dinas Pariwisata DIY Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp35.850.185.877,00 dan realisasi sebesar Rp35.201.918.780,00 atau 98,19%, dengan rincian sebagai berikut:

3.1.2.1.1 Belanja Pegawai **Rp8.474.691.931,00** **Rp8.526.175.295,00**

Belanja Pegawai Dinas Pariwisata DIY Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp8.644.759.861,00 direalisasikan sebesar Rp8.474.691.931,00 atau (98,03%). Realisasi Belanja Pegawai tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp51.483.364,00 (0,60%) dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp8.526.175.295,00. Realisasi Belanja Pegawai Dinas Pariwisata DIY Tahun Anggaran 2023 terdiri dari Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp4.221.631.681,00, Tambahan Penghasilan ASN sebesar Rp4.199.110.250,00, dan Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif sebesar Rp53.950.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.5

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai pada Belanja Gaji dan Tunjangan ASN

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Gaji Pokok PNS	2.503.054.398	2.484.027.180	99,24	2.511.059.320
Gaji Pokok Tenaga Bantu	796.128.112	779.947.672	97,97	820.995.910
Tunjangan Keluarga PNS	219.421.092	217.532.256	99,14	229.091.942
Tunjangan Jabatan PNS	194.134.681	110.950.000	57,15	196.340.000
Tunjangan Fungsional PNS	132.706.000	132.706.000	100,00	34.270.000
Tunjangan Fungsional Umum PNS	80.925.000	80.555.000	99,54	81.005.000
Tunjangan Beras PNS	132.383.760	131.804.400	99,56	138.177.360
Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus PNS	10.085.936	9.969.781	98,85	9.759.824
Pembulatan Gaji PNS	34.949	34.017	97,33	37.933
Iuran Jaminan Kesehatan PNS	226.271.842	223.331.808	98,70	222.800.360
Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	27.070.096	26.791.120	98,97	28.148.496
Iuran JKK PNS	5.151.455	5.091.418	98,83	5.146.902
Iuran JKK PPPK	1.624.189	1.607.455	98,97	1.688.904
Iuran JKM PNS	15.454.364	15.274.254	98,83	15.440.702
Iuran JKM PPPK	2.030.242	2.009.320	98,97	2.111.130
Jumlah	4.346.476.116	4.221.631.681	97,13	4.296.073.783

Tabel III.6

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai pada Belanja Tambahan Penghasilan ASN

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	2.085.010.802	2.061.418.500	98,87	1.946.044.135
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.925.946.012	1.907.298.550	99,03	1.778.589.107
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	159.064.790	154.119.950	96,89	167.455.028
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	18.790.199	18.513.150	98,53	0
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	18.790.199	18.513.150	98,53	0
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	0	0	0,00	107.181.071
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	0	0	0,00	107.181.071
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	2.140.182.744	2.119.178.600	99,02	2.124.396.306
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.981.117.954	1.965.058.650	99,19	1.956.941.278
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	159.064.790	154.119.950	96,89	167.455.028
Jumlah	4.243.983.745	4.199.110.250	98,94	4.177.621.512

Tabel III.7

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai pada Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	54.300.000	53.950.000	99,36	52.480.000
Belanja Honorarium	37.500.000	37.150.000	99,07	35.680.000
Belanja Jasa Pengelolaan BMD	16.800.000	16.800.000	100,00	16.800.000
Jumlah	54.300.000	53.950.000	99,36	52.480.000

3.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa Rp26.727.226.849,00 Rp29.142.673.791,00

Belanja Barang dan Jasa Dinas Pariwisata DIY Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp27.205.426.016,00 direalisasikan sebesar Rp26.727.226.849,00 (98,24%). Realisasi Belanja Barang dan Jasa Dinas Pariwisata DIY tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp2.415.446.942,00 atau (8,29%) dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar Rp29.142.673.791,00 dengan rincian berikut:

Tabel III.8
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa

No	Uraian	2023			2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	Belanja Barang Pakai Habis	4.942.779.300	4.875.213.346	98,63	4.615.367.455
2.	Belanja Jasa Kantor	15.323.765.016	15.145.442.725	98,84	15.235.844.386
3.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.844.932.100	1.804.932.730	97,83	1.884.372.000

4.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	742.580.500	698.940.000	94,12	964.200.000
5.	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	161.530.700	156.008.990	96,58	49.250.000
6.	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.610.637.500	1.510.266.515	93,77	2.938.345.325
7.	Belanja Kursus/ Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	0	0	0,00	160.000.000
8.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	94.219.800	90.299.800	95,84	142.555.000
9.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	180.000.000	177.758.000,00	98,75	479.660.000
10.	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0	0	0,00	30.600.000
11.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	976.694.000	953.311.043	97,61	990.942.425
12.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	148.352.200	135.118.800	91,08	627.287.200
13.	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat	1.179.934.900	1.179.934.900	100,00	1.024.250.000
	Jumlah	27.205.426.016	26.727.226.849	98,24	29.142.673.791

3.1.2.1.3 Belanja Hibah Rp0,00 Rp0,00

Belanja hibah Dinas Pariwisata DIY Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp0,00 direalisasikan sebesar Rp0,00 (0%). Realisasi belanja hibah Dinas Pariwisata DIY tahun 2023 tidak mengalami kenaikan/penurunan dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar Rp0,00.

3.1.2.2. Belanja Modal Rp2.726.009.000,00 Rp217.436.999,00

Belanja Modal Dinas Pariwisata DIY Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp 2.727.137.536,00 direalisasikan sebesar Rp2.726.009.000,00 atau 99,96%. Realisasi Belanja Modal Dinas Pariwisata DIY tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp2.508.572.001,00 (1.153,70%) dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal tahun 2022 sebesar Rp 217.436.999,00. Realisasi Belanja Modal Dinas Pariwisata DIY tahun 2023 dirinci sebagai berikut:

Tabel III.9
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal per Jenis

No	Uraian	2023			2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	29.704.000,00	28.956.000,00	97,48	157.038.999,00
3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.697.433.536,00	2.697.053.000,00	99,99	25.000.000,00

4.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	35.398.000,00
6.	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	2.727.137.536,00	2.726.009.000,00	99,96	217.436.999,00

3.1.2.2.1 Belanja Modal Tanah Rp 0,00 Rp 0,00

Belanja Modal Tanah Dinas Pariwisata DIY Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp0,00 dan realisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00%. Realisasi Belanja Modal Tanah tahun 2022 tidak mengalami kenaikan/penurunan dibandingkan dengan realisasi belanja modal tanah tahun 2022 yaitu sebesar Rp0,00.

3.1.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp28.956.000,00 Rp157.038.999,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Dinas Pariwisata DIY Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp29.704.000,00 dengan realisasi sebesar Rp28.956.000,00 atau 97,48%. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp128.082.999,00 atau (81,56%) dari realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun 2022 sebesar Rp157.038.999,00.

Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp28.956.000,00 telah dicatat menambah Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp28.956.000,00. Mutasi tambah Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp28.956.000,00 tersebut dirinci sebagai berikut:

Tabel III.10

Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang Menambah Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin

No	Uraian	Realisasi (Rp)
1	Alat Kantor Lainnya	7.200.000,00
2	Alat Pendingin	15.984.000,00
3	Peralatan Personal Computer	5.772.000,00
	Jumlah	28.956.000,00

3.1.2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp2.697.053.000,00 Rp25.000.000,00

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Dinas Pariwisata DIY Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp2.697.433.536,00, realisasi sebesar Rp2.697.053.000,00 atau 99,99%. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp2.672.053.000,00 dari realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan tahun

2022 sebesar Rp25.000.000,00. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan tahun 2023 sebesar Rp2.697.053.000,00 telah dicatat menambah Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp2.161.458.000,00, reklasifikasi ke Peralatan dan Mesin sebesar Rp534.505.000,00, *extracomptable* sebesar Rp1.090.000,00. Mutasi tambah Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp2.161.458.000,00 tersebut dirinci sebagai berikut.

Tabel III.11

Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang Menambah Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan TA 2023

No	Uraian	Realisasi (Rp)
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2.161.458.000,00
	Jumlah	2.161.458.000,00

3.1.2.2.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp0,00 Rp0,00

Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Dinas Pariwisata DIY Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp0,00 dengan realisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00%. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Dinas Pariwisata DIY Tahun Anggaran 2023 tidak mengalami kenaikan/penurunan dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan tahun 2022 sebesar Rp0,00.

3.1.2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp0,00 Rp35.398.000,00

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Dinas Pariwisata DIY Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp0,00 dengan realisasi sebesar Rp0,00 atau 00,00%. Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp35.398.000,00 dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya tahun 2022 sebesar Rp35.398.000,00.

3.1.2.2.6 Belanja Modal Aset Lainnya Rp 0,00 Rp 0,00

Belanja Modal Aset Lainnya Dinas Pariwisata DIY Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp0,00 dan realisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00%. Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya tahun 2023 tidak mengalami kenaikan/penurunan dibandingkan realisasi Belanja Modal Aset Tetap tahun 2022 sebesar Rp0,00

3.1.2.3. Surplus/Defisit Rp(37.397.677.780,00) Rp(37.358.085.159,00)

Surplus/Defisit Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp(38.577.323.413,00) direalisasikan sebesar Rp(37.397.677.780,00) atau (96,94%). Jumlah tersebut merupakan selisih antara total realisasi pendapatan dan total realisasi belanja Tahun Anggaran 2023. Defisit tahun 2023 naik sebesar Rp39.592.621,00 atau 0,11% dibandingkan dengan defisit tahun 2022 sebesar Rp(37.358.085.159,00). Defisit dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel III.12
Surplus/Defisit

Uraian	2023			2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Pendapatan	0,00	530.250.000,00	0,00	528.200.926
Belanja	38.577.323.413,00	37.927.927.780,00	98,32	37.886.286.085
Jumlah	(38.577.323.413,00)	(37.397.677.780,00)	96,94	(37.358.085.159,00)

		2023	2022 (Audited)
3.1.3	<u>Aset</u>	<u>Rp137.398.078.854,59</u>	<u>Rp137.717.354.501,89</u>

Aset Dinas Pariwisata DIY per 31 Desember 2022 sebesar Rp137.398.078.854,59 terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp50.578.185,00, Aset Tetap sebesar Rp 135.330.199.619,59 dan Aset Lainnya sebesar Rp2.017.301.050,00. Aset Dinas Pariwisata DIY per 31 Desember 2023 mengalami penurunan sebesar Rp 319.275.647,30 atau sebesar 0,23% dibandingkan dengan aset tahun 2022 sebesar Rp137.717.354.501,89 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.13
Rincian Aset

No.	Uraian	2023	2022
1.	Aset Lancar	50.578.185,00	115.506.767,00
2.	Aset Tetap	135.330.199.619,59	135.568.846.684,89
3.	Aset Lainnya	2.017.301.050,00	2.033.001.050,00
	Jumlah	137.398.078.854,59	137.717.354.501,89

3.1.3.1 Aset Lancar Rp50.578.185,00 Rp115.506.767,00

Aset Lancar Dinas Pariwisata DIY per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp50.578.185,00 terdiri dari Kas dan Setara Kas sebesar Rp0,00, Piutang Retribusi Daerah sebesar Rp5.250.000,00; Penyisihan Piutang sebesar (Rp5.250.000,00); dan Persediaan sebesar Rp50.578.185,00. Saldo Aset Lancar Dinas Pariwisata DIY per 31 Desember 2023 mengalami penurunan sebesar Rp64.928.582,00 (56,21%) dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp115.506.767,00,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.14
Rincian Aset Lancar

No.	Uraian	2023	2022
1.	Kas dan Setara Kas	0,00	8.825.943,00
2.	Piutang Retribusi Daerah	5.250.000,00	5.250.000,00
3.	Piutang Lainnya	-	-
4.	Penyisihan Piutang	(5.250.000,00)	(5.250.000,00)
5.	Beban Dibayar Dimuka	-	-
6.	Persediaan	50.578.185,00	106.680.824,00
	Jumlah	50.578.185,00	115.506.767,00

3.1.3.1.1 Kas dan Setara Kas Rp0,00 Rp8.825.943,00

Saldo Kas dan Setara Kas Dinas Pariwisata DIY per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 terdiri dari Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp0,00 dan Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp0,00.

3.1.3.1.2 Piutang Retribusi Daerah Rp5.250.000,00 Rp5.250.000,00

Saldo Piutang Pendapatan Dinas Pariwisata DIY per 31 Desember 2023 sebesar Rp5.250.000,00 terdiri dari Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp5.250.000,00; Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp0,00; dan Piutang Lain-lain PAD Yang Sah sebesar Rp0,00.

Tabel III.15
Rincian Mutasi Piutang Retribusi

Piutang Pendapatan	Saldo Awal 31-12-2022	Bertambah	Berkurang	Saldo Akhir 31-12-2023
Piutang Retribusi Daerah Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	5.250.000,00	0,00	0,00	5.250.000,00
Jumlah (Rp)	5.250.000,00	0,00	0,00	5.250.000,00

Tabel III.16
Kategori Umur Piutang Retribusi

Umur Piutang	Kualitas Piutang	Jumlah (Rp)
0 - 1 bulan	Lancar	-
1 - 3 bulan	Kurang Lancar	-
3 - 12 bulan	Diragukan	-
> 12 bulan	Macet	5.250.000,00
	Jumlah(Rp)	5.250.000,00

Piutang Retribusi berasal dari kekurangan pembayaran sewa ruangan di TIC Jl. Malioboro untuk usaha warung telekomunikasi berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 011/1458 tanggal 24 Januari 2006, antara Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Badan Pariwisata Daerah-dahulu) dan PT. Karya Bhakti Jaya Mandiri. Total nilai sewa sebesar Rp 10.250.000,00. Sampai dengan tahun 2006 sewa yang telah dibayarkan adalah sebesar Rp 5.000.000,00 sehingga masih ada kekurangan pembayaran sebesar Rp5.250.000,00. Piutang Retribusi sebesar Rp5.250.000,00 tersebut dalam kategori macet.

3.1.3.1.3 Penyisihan Piutang Rp(5.250.000,00) Rp(5.250.000,00)

Saldo Penyisihan Piutang per 31 Desember 2023 sebesar Rp(5.250.000,00) terdiri dari Penyisihan Piutang Pendapatan sebesar Rp(5.250.000,00); Penyisihan Piutang Lainnya sebesar Rp0,00. Penyisihan Piutang Pendapatan sebesar Rp(5.250.000,00) tersebut merupakan Penyisihan Piutang Retribusi, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.17

Rincian Penyisihan Piutang Retribusi

Umur Piutang	Kualitas Piutang	Persentase	Jumlah Piutang (Rp)	Jumlah Penyisihan Piutang (Rp)
0 - 1 bulan	Lancar	0,5% (nol koma lima persen)	-	-
1 - 3 bulan	Kurang Lancar	10% (sepuluh persen)	-	-
3 - 12 bulan	Diragukan	50% (lima puluh persen)	-	-
> 12 bulan	Macet	100% (seratus persen)	5.250.000,00	5.250.000,00
Jumlah			5.250.000,00	5.250.000,00

3.1.3.1.5 Persediaan Rp50.578.185,00 Rp106.680.824,00

Saldo persediaan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp50.578.185,00 berupa Barang Pakai Habis sebesar Rp50.578.185,00. Saldo persediaan per 31 Desember 2023 berasal dari saldo awal sebesar Rp106.680.824,00. Realisasi belanja barang pakai habis sebesar Rp3.192.714.346,00. Mutasi kurang berupa pemanfaatan atau penggunaan sebesar Rp3.248.816.985,00.

Tabel III.18

Rincian Mutasi Persediaan

SALDO AWAL	Rp106.680.824,00
Penambahan:	
- Belanja barang pakai habis	3.192.714.346,00
Jumlah Penambahan (Rp)	3.192.714.346,00
Pengurangan:	
- Pemanfaatan/penggunaan	3.248.816.985,00
Jumlah Pengurangan(Rp)	3.248.816.985,00
SALDO AKHIR	50.578.185,00

Tabel III.19

Rincian Persediaan Barang Pakai Habis

No	Uraian	2023	2022
1.	Bahan Bakar dan Pelumas	9.150.000,00	13.030.000,00
2.	Alat Tulis Kantor	1.080.050,00	1.158.000,00
3.	Kertas dan Cover	743.000,00	817.500,00
4.	Bahan Cetak	2.603.000,00	51.437.919,00
5.	Benda Pos	260.000,00	396.000,00
6.	Perabot Kantor	518.600,00	2.330.820,00
7.	Alat Listrik	3.895.600,00	2.670.400,00
8.	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	32.327.935,00	34.840.185,00
	Jumlah (Rp)	50.578.185,00	106.680.824,00

Tabel III.20

Mutasi Persediaan Barang Pakai Habis

No	Uraian	Saldo Awal 31-12-2022	2023		Saldo Akhir 31-12-2023
			Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	
1	Bahan Kimia	0	1.432.000	1.432.000	0
2	Bahan Bakar dan Pelumas	13.030.000	148.795.000	152.675.000	13.030.000
3	Isi Tabung Pemadam Kebakaran		2.100.000	2.100.000	
4	Bahan Lainnya	0	88.816.000	88.816.000	0
5	Suku Cadang Alat Angkutan	0	33.873.800	33.873.800	0
6	Alat Tulis Kantor	1.158.000	149.115.494	149.193.444	1.158.000
7	Kertas dan Cover	817.500	36.104.830	36.179.330	817.500
8	Bahan Cetak	51.437.919	917.229.340	966.064.259	51.437.919
9	Benda Pos	396.000	3.080.000	3.216.000	396.000
10	Bahan Komputer	0	8.089.654	8.089.654	0
11	Perabot Kantor	2.330.820	22.289.800	24.102.020	2.330.820
12	Alat Listrik	2.670.400	16.761.500	15.536.300	2.670.400
13	Perlengkapan Dinas	0	620.756.500	620.756.500	0
14	Suvenir/Cendera Mata	0	175.109.428	175.109.428	0
15	Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	34.840.185	503.886.000	506.398.250	34.840.185
16	Persediaan Untuk Dijual/ diserahkan kepada Masyarakat	0	324.025.000	324.025.000	0
17	Natura	0	141.250.000	141.250.000	0
	JUMLAH	106.680.824	3.192.714.346	3.248.816.985	106.680.824

2023 **2022 (Audited)**

3.1.3.2 Aset Tetap **Rp135.330.199.619,59** **Rp135.568.846.684,89**

Aset Tetap Dinas Pariwisata DIY per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 135.330.199.619,59 merupakan nilai buku aset tetap dengan nilai perolehan sebesar Rp155.507.751.059,02 dikurangi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebesar Rp20.177.551.439,43. Aset Tetap Dinas Pariwisata DIY per 31 Desember 2023 mengalami penurunan sebesar Rp238.647.065,30 atau 0,18% dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp135.568.846.684,89 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.21
Rincian Aset Tetap per Jenis

No	Uraian	2023	2022
1.	Tanah	63.635.490.540,00	63.635.490.540,00
2.	Peralatan dan Mesin	7.581.021.164,08	6.953.226.951,01
3.	Gedung dan Bangunan	71.265.091.751,00	69.103.633.751,00
4.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	12.581.738.400,00	12.581.738.400,00
5.	Aset Tetap Lainnya	444.409.203,94	44.635.000,01
6.	Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00	0,00
	Jumlah (Rp)	155.507.751.059,02	152.318.724.642,02
7.	Akumulasi Penyusutan	(20.177.551.439,43)	(16.749.877.957,13)
	Jumlah (Rp)	135.330.199.619,59	135.568.846.684,89

3.1.3.2.1 Tanah **Rp63.635.490.540,00** **Rp63.635.490.540,00**

Saldo Tanah Dinas Pariwisata DIY per 31 Desember 2023 sebesar Rp63.635.490.540,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.22
Rincian Tanah per Objek

No	Uraian	2023	2022
1.	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	63.635.490.540,00	61.955.490.540,00
2.	Tanah Pertanian	0,00	1.680.000.000,00
	Jumlah (Rp)	63.635.490.540,00	63.635.490.540,00

Saldo Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp1.680.000.000,00 dibandingkan dengan Saldo Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja tahun 2022 karena terdapat koreksi kode barang dari Tanah Non Persil- Tanah Pertanian

menjadi Tanah Persil- Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja- Tanah Bangunan Taman/Wisata/Rekreasi sebesar Rp1.680.000.000,00, yang berlokasi di Tonogoro, Banjaroyo- Kalibawang- Kulon Progo.

3.1.3.2.2 Peralatan dan Mesin Rp7.581.021.164,08 Rp6.953.226.951,01

Saldo Peralatan dan Mesin Dinas Pariwisata DIY per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp7.581.021.164,08 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.23
Rincian Peralatan dan Mesin

No	Uraian	2023	2022
1.	Alat Besar	1.410.860.000,00	1.403.450.000,00
2.	Alat Angkutan	1.493.023.600,00	1.493.023.600,00
3.	Alat Bengkel dan Alat Ukur	280.423.000,00	280.423.000,00
4.	Alat Pertanian	14.000.000,00	14.000.000,00
5.	Alat Kantor dan Rumah Tangga	3.058.588.648,08	2.465.019.435,01
6.	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	360.179.540,00	348.379.540,00
7.	Alat Kedokteran dan Kesehatan	79.280.000,00	79.280.000,00
8.	Alat Laboratorium	29.886.000,0	28.230.000,00
9.	Komputer	789.965.376,00	776.606.376,00
10.	Alat Eksplorasi	64.815.000,00	64.815.000,00
	Jumlah	7.581.021.164,08	6.953.226.951,01

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 sebesar Rp7.581.021.164,08 mengalami kenaikan sebesar Rp627.794.213,07 (9,03%) dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp6.953.226.951,01, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Terdapat mutasi tambah sebesar Rp634.813.483,07 berupa:
 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp28.956.000,00.
 - Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan sebesar Rp535.595.000,00
 - Mutasi terima dari OPD lain (Diskop UKM DIY) sebesar Rp14.934.063,00
 - Mutasi terima dari OPD lain (BPKA DIY) sebesar Rp55.328.420,07
2. Mutasi kurang sebesar Rp7.019.270,00, yang terdiri dari:
 - Reklasifikasi ke Aset Rusak (penghapusan) sebesar Rp3.460.000,00
 - *Extracomptable* dari Reklasifikasi Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.090.000,00
 - *Extracomptable* mutasi masuk dari Diskop UKM DIY sebesar Rp2.469.270,00

Tabel III.24
Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin

SALDO AWAL	6.953.226.951,01
Penambahan:	
Belanja Modal	28.956.000,00
Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan	535.595.000,00
Mutasi masuk dari OPD Lain (DISKOPUKM DIY)	14.934.063,00
Mutasi masuk dari OPD Lain (BPKA DIY)	55.328.420,07
Jumlah Penambahan (Rp)	634.813.483,07
Pengurangan:	
Reklasifikasi Aset Tetap ke Aset Lainnya (penghapusan)	3.460.000,00
<i>Extracomptable</i> dari reklas BM Gedung dan Bangunan	1.090.000,00
<i>Extracomptable</i> Mutasi masuk dari DISKOPUKM DIY	2.469.270,00
Jumlah Pengurangan(Rp)	7.019.270,00
SALDO AKHIR	7.581.021.164,08

3.1.3.2.3 Gedung dan Bangunan Rp71.265.091.751,00 Rp69.103.633.751,00

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 sebesar Rp71.265.091.751,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.25
Rincian Gedung dan Bangunan

No	Uraian	2023	2022
	Bangunan Gedung	70.847.591.751,00	68.686.133.751,00
1.	Bangunan Gedung Kantor	10.211.539.100,00	8.050.081.100,00
2.	Bangunan Gudang	319.000.000,00	319.000.000,00
3.	Bangunan Gedung Tempat Ibadah	567.189.000,00	567.189.000,00
4.	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	22.460.842.140,00	22.460.842.140,00
5.	Bangunan Gedung Tempat Olahraga	326.000.000,00	326.000.000,00
6.	Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/ Pasar	736.843.700,00	736.843.700,00
7.	Bangunan Gedung Garasi/Pool	10.120.200.011,00	10.120.200.011,00
8.	Bangunan Peternakan/Perikanan	14.000.000,00	14.000.000,00
9.	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	3.041.107.800,00	3.041.107.800,00
10.	Bangunan Parkir	78.000.000,00	78.000.000,00
11.	Hotel	19.713.870.000,00	19.713.870.000,00
12.	Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	3.259.000.000,00	3.259.000.000,00
	Tugu Titik Kontrol/Pasti	417.500.000,00	417.500.000,00
1.	Tugu/Tanda Batas Admistrasi	48.500.000,00	48.500.000,00
2.	Pagar	369.000.000,00	369.000.000,00
	Jumlah	71.265.091.751,00	69.103.633.751,00

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 sebesar Rp71.265.091.751,00, mengalami kenaikan sebesar Rp2.161.458.000,00 (3,13%) dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp69.103.633.751,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Terdapat mutasi tambah sebesar Rp2.161.458.000,00 berupa:
 - Belanja modal gedung dan bangunan tahun 2023 sebesar Rp2.161.458.000,00.
2. Mutasi kurang sebesar Rp0,00.

Tabel III.26
Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan

SALDO AWAL	69.103.633.751,00
Penambahan:	
Belanja Modal	2.161.458.000,00
Jumlah (Rp)	71.265.091.751,00
Pengurangan:	
Nihil	0,00
Jumlah (Rp)	0,00
SALDO AKHIR	71.265.091.751,00

3.1.3.2.4 Jalan, Jaringan, dan Irigasi Rp12.581.738.400,00 Rp12.581.738.400,00

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan Dinas Pariwisata DIY per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp12.581.738.400,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.27
Rincian Jalan, Irigasi dan Jaringan

Uraian	2023	2022
Jalan Khusus	12.558.079.400,00	12.558.079.400,00
Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air	21.000.000,00	21.000.000,00
Instalasi Pengaman Penangkal Petir	2.659.000,00	2.659.000,00
Jumlah	12.581.738.400,00	12.581.738.400,00

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 sebesar Rp12.581.738.400,00 tidak mengalami kenaikan/penurunan dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp12.581.738.400,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Mutasi tambah sebesar Rp0,00
2. Mutasi kurang sebesar Rp0,00.

Tabel III.28
Rincian Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan

SALDO AWAL	12.581.738.400,00
Penambahan:	
Nihil	0,00
Jumlah (Rp)	12.581.738.400,00
Pengurangan:	
Nihil	0,00
Jumlah (Rp)	0,00
SALDO AKHIR	12.581.738.400,00

3.1.3.2.5 Aset Tetap Lainnya Rp444.409.203,94 Rp 44.635.000,01

Saldo Aset Tetap Lainnya Dinas Pariwisata DIY per 31 Desember 2023 sebesar Rp 444.409.203,94, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.29
Rincian Aset Tetap Lainnya per Objek

No	Uraian	2023	2022
1.	Bahan Perpustakaan	10.034.000,00	10.034.000,00
2.	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	34.601.000,01	34.601.000,01
3.	Aset Tetap Dalam Renovasi	399.774.203,93	0,00
	Jumlah	444.409.203,94	44.635.000,01

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp444.409.203,94, mengalami kenaikan sebesar Rp399.774.203,93 atau (895,65%) dibandingkan dengan saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp44.635.000,01 dengan penjelasan berikut:

1. Mutasi tambah Aset Tetap dalam Renovasi sebesar Rp399.774.203,93 dari BPKA DIY selaku Pejabat Penatausahaan BMD
2. Mutasi kurang sebesar Rp0,00.

3.1.3.2.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp0,00 Rp0,00

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan Dinas Pariwisata DIY per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00, tidak mengalami kenaikan/penurunan dibandingkan Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan Dinas Pariwisata DIY per 31 Desember 2022 yang sebesar Rp0,00.

3.1.3.2.7 Akumulasi Penyusutan Rp(20.177.551.439,43) Rp(16.749.877.957,13)

Saldo Akumulasi Penyusutan Dinas Pariwisata DIY per 31 Desember 2023 sebesar Rp 20.177.551.439,43 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.30

Rincian Akumulasi Penyusutan per Objek

No	Uraian	2023	2022
1.	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(5.117.140.659,14)	(4.331.763.128,84)
2.	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(8.109.172.504,04)	(6.723.517.442,04)
3.	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(6.951.238.276,25)	(5.694.597.386,25)
4.	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
	Jumlah	(20.177.551.439,43)	(16.749.877.957,13)

3.1.7.3 Aset Lainnya Rp2.017.301.050,00 Rp2.033.001.050,00

Aset Lainnya Dinas Pariwisata DIY per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.017.301.050,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.31

Rincian Aset Lainnya

No	Uraian	2023	2022
1.	Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00
2.	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
3.	Aset Tidak Berwujud	2.017.301.050,00	2.017.301.050,00
4.	Aset Lain-lain	0,00	15.700.000,00
	Jumlah	2.017.301.050,00	2.033.001.050,00

Tabel III.32

Rincian Mutasi Aset Lainnya

SALDO AWAL	2.033.001.050,00
Penambahan:	
	-
Jumlah (Rp)	-
Pengurangan:	
Penghapusan	15.700.000,00
Jumlah (Rp)	15.700.000,00
SALDO AKHIR	2.017.301.050,00

3.1.3.3.1 Tagihan Jangka Panjang Rp0,00 Rp0,00

Tagihan Jangka Panjang Dinas Pariwisata DIY per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 terdiri dari Tagihan Penjualan Angsuran sebesar Rp0,00, Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebesar Rp0,00, dan Tagihan Sewa sebesar Rp0,00.

3.1.3.3.2 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga Rp0,00 Rp0,00

Kemitraan dengan Pihak Ketiga Dinas Pariwisata DIY per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0,00. Rincian Saldo Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 adalah:

Tabel III.33

Rincian Kemitraan dengan Pihak Ketiga

N	Uraian	2023	2022
1.	Sewa	0,00	0,00
2.	Kerjasama Pemanfaatan	0,00	0,00
3.	Bangun Guna Serah	0,00	0,00
4.	Bangun Serah Guna	0,00	0,00
5.	Pinjam Pakai	0,00	0,00
6.	Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00

Saldo Kemitraan dengan Pihak Ketiga tahun 2023 tidak mengalami kenaikan/penurunan dibandingkan dengan saldo tahun 2019 sebesar Rp0,00.

3.1.3.3.3 Aset Tidak Berwujud Rp2.017.301.050,00 Rp2.017.301.050,00

Aset Tidak Berwujud Dinas Pariwisata DIY per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.017.301.050,00 merupakan Aset Tidak Berwujud Lainnya sebesar Rp2.017.301.050,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.34

Rincian Aset Tidak Berwujud Lainnya

No	Uraian	2023	2022
1.	Software	204.605.000,00	204.605.000,00
2.	Kajian	1.812.696.050,00	1.812.696.050,00
	Jumlah	2.017.301.050,00	2.017.301.050,00

Saldo Aset Tidak Berwujud tahun 2023 tidak mengalami kenaikan/penurunan dibandingkan dengan saldo Saldo Aset Tidak Berwujud tahun 2022 sebesar Rp2.017.301.050,00.

3.1.7.3.4 Aset Lain-lain**Rp0,00****Rp 15.700.000,00**

Aset Lain-lain Dinas Pariwisata DIY per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00, mengalami penurunan sebesar Rp15.700.000,00 dibandingkan dengan saldo Saldo Aset Lain-lain tahun 2022 sebesar Rp15.700.000,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel III.35
Rincian Aset Lain-lain

SALDO AWAL	15.700.000,00
Penambahan:	
Aset Rusak Berat/ Usang (penghapusan)	3.460.000,00
Jumlah (Rp)	19.160.000,00
Pengurangan:	
Penghapusan	19.160.000,00
Jumlah (Rp)	0,00
SALDO AKHIR	0,00

		<u>2023</u>	<u>2022 (Audited)</u>
3.1.4	<u>Kewajiban</u>	<u>Rp737.642.185,00</u>	<u>Rp410.823.940,10</u>

Kewajiban Dinas Pariwisata DIY per 31 Desember 2023 sebesar Rp737.642.185,00 merupakan Kewajiban Jangka Pendek berupa Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp 704.645.604,00 dan Utang Belanja Rp32.996.581,00.

3.1.4.1 Kewajiban Jangka Pendek Rp737.642.185,00 Rp410.823.940,10

Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2023 sebesar Rp737.642.185,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.36
Rincian Kewajiban

No	Uraian	2023	2022
1.	Pendapatan Diterima Dimuka	704.645.604,00	373.084.645,10
2.	Utang Belanja	32.996.581,00	37.739.295,00
	Jumlah	737.642.185,00	410.823.940,10

3.1.4.1.1 Pendapatan Diterima di Muka Rp737.642.185,00 Rp373.084.645,10

Pendapatan Diterima di Muka Dinas Pariwisata DIY per 31 Desember 2023 sebesar Rp737.642.185,00 merupakan penerimaan pembayaran sewa dari pihak lain terkait dengan pemakaian aset daerah namun sampai dengan per 31 Desember 2023 belum dikonsumsi/dimanfaatkan oleh pihak tersebut. Pendapatan Diterima di Muka sebesar Rp Rp737.642.185,00 dirinci sebagai berikut:

Tabel III.37
Rincian Pendapatan Diterima di Muka

NO	LOKASI	KETERANGAN	Nomor Perjanjian	Pendapatan Diterima di Muka	
				Periode	Nilai (Rp)
1	Hotel Mutiara 2	Pembayaran BTS Tower Eks Hotel Mutiara 2 di Jl. Malioboro Yogyakarta selama 3 tahun PT. Protelindo untuk periode sewa 20/02/2022 s.d. 19/02/2025	934/04808	1/01/2024 s.d 19/02/2025	68.241.758

3	Hotel Mutiara 2	Pembayaran Penggunaan Menara PemancarBTS yang terletak di Eks Hotel Mutiara 2 Kota Yogyakarta selama 3 Tahun PT. Inti Bangun Sejahtera untuk periode sewa 08/10/2022 s.d. 07/10/2025	934/01601	1/01/2024 s.d 07/10/2025	106.153.846
4	Parkir Candi Ratu Boko	Sewa lahan parkir selama 5 tahun oleh PT. TWC BPRB untuk periode sewa 01/01/2024 s.d. 31/12/2028	934/12896	1/01/2024 s.d 31/12/2028	530.250.000
				JUMLAH	704.645.604

3.1.4.1.2 Utang Belanja **Rp32.996.581,00** **Rp37.739.295,00**

Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2023 sebesar Rp32.996.581,00 merupakan beban Dinas Pariwisata DIY atas pemakaian barang atau jasa sampai dengan per 31 Desember 2023 tetapi belum dibayar oleh Dinas Pariwisata DIY. Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2023 mengalami penurunan sebesar Rp4.742.714,00 (12,57%) dibandingkan dengan saldo tahun 2022 sebesar Rp37.739.295,00. Rincian Utang Belanja Dinas Pariwisata DIY tahun 2023 adalah berikut:

Tabel III.38
Rincian Utang Belanja

No	Uraian	2023	2022
1.	Utang Belanja Pegawai	0,00	0,00
	Jumlah Utang Belanja Pegawai	0,00	0,00
2.	Utang Belanja Jasa		
	- Telepon	307.515,00	309.610,00
	- Listrik	31.794.066,00	36.534.685,00
	- Air	895.000,00	895.000,00
	Jumlah Utang Belanja Jasa	32.996.581,00	37.739.295,00
3.	Utang Belanja Modal	0,00	0,00
4. dst.	0,00	0,00
	Jumlah Utang Belanja	32.996.581,00	37.739.295,00

3.1.5 Ekuitas **2023** **2022 (Audited)**
Rp136.660.436.669,59 **Rp137.306.530.561,79**

Saldo Ekuitas sebesar Rp136.660.436.669,59 merupakan kekayaan bersih Dinas Pariwisata DIY yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban Dinas Pariwisata DIY pada tanggal 31 Desember 2023. Saldo Ekuitas Dinas Pariwisata DIY tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp646.093.892,20 (0,47%) dibandingkan dengan saldo tahun 2022 sebesar Rp137.306.530.561,79. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah Surplus/Defisit-LO

Tabel III.40

Rincian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-LO

No	Uraian	2023	2022
1.	Hasil Sewa BMD-LO	198.689.041,10	153.271.062,00
2.	Hasil Kerjasama Pemanfaatan BMD-LO	0,00	4.534.260,00
	Jumlah	198.689.041,10	157.805.322,00

2023**2022****3.1.7 Beban****Rp38.670.538.527,68****Rp41.016.457.954,71**

Realisasi Beban Dinas Pariwisata DIY Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp38.670.538.527,68 adalah penurunan manfaat ekonomi, jasa, pengeluaran dan konsumsi aset selama periode Tahun Anggaran 2023, dengan rincian berikut ini:

3.1.7.1 Beban Operasi-LO**Rp35.254.368.705,00****Rp37.678.595.682,00**

Beban Operasi Dinas Pariwisata DIY Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp35.254.368.705,00 terdiri dari Beban Pegawai sebesar Rp8.474.691.931,00; Beban Barang dan Jasa sebesar Rp26.779.676.774,00 dengan rincian sebagai berikut:

3.1.7.1.1 Beban Pegawai-LO**Rp8.474.691.931,00****Rp8.526.175.295,00**

Beban Pegawai-LO Dinas Pariwisata DIY Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp8.474.691.931,00, mengalami penurunan sebesar Rp51.483.364,00 (0,60%) dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp8.526.175.295,00. Beban Pegawai Dinas Pariwisata DIY Tahun Anggaran 2023 merupakan kompensasi terhadap pegawai yang harus dibayarkan kepada Pegawai Negeri Sipil dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal, dengan rincian berikut:

Tabel III.41

Rincian Beban Pegawai-LO

No	Uraian	2023	2022
1.	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	4.221.631.681,00	4.296.073.783,00
2.	Beban Tambahan Penghasilan ASN	4.199.110.250,00	4.177.621.512,00
3.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	53.950.000,00	52.480.000,00
	Jumlah	8.474.691.931,00	8.526.175.295,00

3.1.7.1.2 Beban Barang dan Jasa Rp26.779.676.774,00 Rp29.152.420.387,00

Beban Barang dan Jasa Dinas Pariwisata DIY Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp26.779.676.774,00. Beban Barang dan Jasa Dinas Pariwisata DIY tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp2.372.743.613,00 (8,14%) dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp29.152.420.387,00. Beban Barang dan Jasa Dinas Pariwisata DIY Tahun 2023 merupakan penurunan manfaat ekonomis dalam periode Tahun 2023 yang menurunkan ekuitas, pengeluaran, konsumsi aset dan timbulnya kewajiban akibat transaksi barang dan jasa. Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel III.42
Rincian Beban Barang dan Jasa-LO

No	Uraian	2023	2022
1.	Beban Barang Pakai Habis	4.931.315.985,00	4.614.901.391,00
2.	Beban Barang Tak Habis Pakai	0,00	0,00
3.	Beban Jasa Kantor	15.140.700.011,00	15.244.138.046,00
4.	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	1.804.932.730,00	1.884.372.000,00
5.	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	698.940.000,00	964.200.000,00
6.	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	156.008.990,00	49.250.000,00
7.	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.510.266.515,00	2.938.345.325,00
8.	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis, serta Pendidikan dan Pelatihan	0,00	160.000.000,00
9.	Beban Pemeliharaan Tanah	0,00	1.919.000,00
10.	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	90.299.800,00	142.555.000,00
11.	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	177.758.000,00	479.660.000,00
12.	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	30.600.000,00
13.	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	953.311.043,00	990.942.425,00
14.	Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	135.118.800,00	627.287.200,00
15.	Beban Uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat	1.179.934.900,00	1.024.250.000,00
16.	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial/kemasyarakatan	0,00	0,00
	Jumlah	26.779.676.774,00	29.152.420.387,00

3.1.7.1.3 Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp3.416.169.822,68 Rp3.337.862.272,71

Beban Penyusutan dan Amortisasi Dinas Pariwisata DIY Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp3.416.169.822,68. Beban Penyusutan dan Amortisasi Dinas Pariwisata DIY Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp78.307.549,97 (2,35%) dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp3.337.862.272,71. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Dinas Pariwisata DIY Tahun Anggaran 2023 adalah berikut:

Tabel III.43

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi

No	Uraian	2023	2022
1.	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	773.873.870,68	705.402.510,71
2.	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	1.385.655.062,00	1.375.818.872,00
3.	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.256.640.890,00	1.256.640.890,00
	Jumlah	3.416.169.822,68	3.337.862.272,71

3.1.7.1.4 Beban Transfer**Rp0,00****Rp0,00**

Beban Transfer Dinas Pariwisata DIY Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp0,00, tidak mengalami kenaikan maupun penurunan dibandingkan dengan Beban Transfer tahun 2022 sebesar Rp0,00.

Tabel III.44

Rincian Beban Transfer

No	Uraian	2023	2022
1.	Beban Bagi Hasil	0,00	0,00
2.	Beban Bantuan Keuangan	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00

3.1.7.1.5 Beban Tak Terduga**Rp0,00****Rp0,00**

Beban Tak Terduga Dinas Pariwisata DIY Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp0,00, tidak mengalami kenaikan maupun penurunan dibandingkan dengan Beban Tak Terduga tahun 2022 sebesar Rp0,00.

Tabel III.45

Rincian Beban Tak Terduga

No	Uraian	2023	2022
1.	Beban Tak Terduga	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00

3.1.7.2 Defisit Non Operasional Rp16.132.000,00 Rp0,00

Defisit Non Operasional –LO Dinas Pariwisata DIY Tahun 2023 sebesar Rp16.132.000,00

3.1.7.3 Surplus/Defisit -LO Rp(38.487.981.486,58) Rp(40.852.152.632,71)

Surplus/Defisit–LO Dinas Pariwisata DIY Tahun 2023 adalah sebesar Rp(38.487.981.486,58). Surplus/Defisit–LO Dinas Pariwisata DIY Tahun 2023 berkurang sebesar Rp2.364.171.146,13 atau 5,79% dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp(40.852.152.632,71). Surplus/Defisit–LO Dinas Pariwisata DIY Tahun 2023 merupakan selisih antara seluruh Pendapatan-LO sebesar Rp198.689.041,10 dan Beban sebesar Rp38.670.538.527,68.

3.1.8 Laporan Perubahan Ekuitas Rp136.660.436.669,59 Rp137.306.530.561,79

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas berisi informasi tentang Ekuitas Awal, Surplus/Defisit LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah atau mengurangi Ekuitas yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, serta Ekuitas Akhir. Laporan Perubahan Ekuitas Dinas Pariwisata DIY Tahun 2023 dijelaskan sebagai berikut:

Tabel III.46
Laporan Perubahan Ekuitas

Uraian	2023	2022
Ekuitas awal	137.306.530.561,79	73.555.632.177,50
Surplus Defisit – LO	(38.487.981.486,58)	(40.852.152.632,71)
RK PPKD	37.388.851.837,00	37.195.665.977,00
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	453.035.757,38	67.407.385.040,00
Jumlah ekuitas akhir	136.660.436.669,59	137.306.530.561,79

3.1.8.1 Ekuitas Awal Rp137.306.530.561,79 Rp73.555.632.177,50

Ekuitas Awal Dinas Pariwisata DIY Tahun 2023 sebesar Rp137.306.530.561,79 mengalami kenaikan sebesar Rp63.750.898.384,29 atau sebesar 86,67% dibandingkan dengan Ekuitas Awal periode sebelumnya yaitu sebesar Rp73.555.632.177,50.

3.1.8.2 Surplus/Defisit-LO Rp(38.487.981.486,58) Rp(40.852.152.632,71)

Surplus/Defisit-LO Dinas Pariwisata DIY Tahun 2023 sebesar Rp(38.487.981.486,58) mengalami kenaikan sebesar Rp2.364.171.146,13 atau sebesar 5,79% dibandingkan dengan Surplus/Defisit-LO periode sebelumnya yaitu sebesar Rp(40.852.152.632,71).

**3.1.8.3 Dampak Kumulatif Rp453.035.757,38 Rp67.407.385.040,00
Perubahan Kebijakan
Akuntansi dan Kesalahan
Mendasar**

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Kesalahan Mendasar Dinas Pariwisata DIY Tahun 2023 sebesar Rp453.035.757,38 merupakan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Kesalahan Mendasar Tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.47

Rincian Dampak Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Mebel	11.710.158,65
2	Alat Pendingin	51.283.054,42
3	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	4.800.000,00
4	Aset Tetap Dalam Renovasi	399.774.203,93
5	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Mebel	(4.439.201,34)
6	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	(7.692.458,28)
7	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	(2.400.000,00)
	Jumlah	453.035.757,38

3.1.8.4 Ekuitas Akhir Rp136.660.436.669,59 Rp137.306.530.561,79

Ekuitas Akhir Dinas Pariwisata DIY tahun 2023 adalah sebesar Rp136.660.436.669,59 merupakan kekayaan bersih yang dimiliki Dinas Pariwisata DIY.

BAB IV

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NONKEUANGAN SKPD

Berdasarkan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pariwisata, Dinas Pariwisata DIY Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. Untuk melaksanakan tugasnya, Dinas Pariwisata mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan program kerja Dinas;
- b. Perumusan kebijakan teknis pengembangan destinasi, pengembangan ekonomi kreatif, pengembangan sumber daya pariwisata dan pemasaran pariwisata;
- c. Fasilitasi pengelolaan destinasi, ekonomi kreatif, sumber daya pariwisata dan pemasaran pariwisata;
- d. Pelaksanaan kerjasama lintas sektor dalam pengelolaan destinasi wisata, ekonomi kreatif, pengembangan sumber daya pariwisata dan pemasaran pariwisata;
- e. Pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif;
- f. Pelaksanaan analisis kepariwisataan dan ekonomi kreatif yang mendukung pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif;
- g. Penyediaan dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat untuk kepentingan pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif;
- h. Pengembangan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif;
- i. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan destinasi, ekonomi kreatif, sumber daya pariwisata dan pemasaran;
- j. Pelaksanaan kegiatan kesekretariatan;
- k. Pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- l. Fasilitasi pembinaan reformasi birokrasi Dinas;
- m. Fasilitasi penyusunan kebijakan proses bisnis Dinas;
- n. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik lingkup Dinas;
- o. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;

- p. Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan ekonomi kreatif yang menjadi kewenangan kabupaten/kota; dan
- q. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsi Dinas.

Susunan Organisasi Dinas Pariwisata adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri atas Subbagian Umum;
- c. Bidang Pengembangan Destinasi Wisata;
- d. Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata;
- e. Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif;
- f. Bidang Pemasaran Pariwisata;
- g. Unit Pelaksana Teknis; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Visi Dinas Pariwisata adalah “Terwujudnya Yogyakarta sebagai salah satu destinasi terkemuka di Asia Tenggara pada tahun 2025 berdasarkan keunggulan produk wisata yang berkualitas, berwawasan budaya, berwawasan lingkungan, berkelanjutan dan menjadi salah satu pendorong tumbuhnya ekonomi kerakyatan.”

Misi Dinas Pariwisata DIY adalah:

1. Mewujudkan destinasi pariwisata DIY yang berbasis budaya, lingkungan, kreatif dan inovatif, maju berkembang dan mampu menggerakkan peningkatan perekonomian masyarakat yang berkelanjutan.
2. Mewujudkan sadar wisata dan sapta pesona bagi seluruh masyarakat DIY untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat melalui sektor kepariwisataan.

BAB V

PENUTUP

Laporan Keuangan Dinas Pariwisata DIY Tahun 2023 merupakan laporan keuangan berbasis akrual sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah yang selambat-lambatnya harus diterapkan pada Tahun 2015.

Laporan Keuangan Dinas Pariwisata DIY Tahun 2023 disusun menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang terintegrasi dari penganggaran, penatausahaan dan pelaporan.

Perencanaan anggaran Dinas Pariwisata DIY Tahun Anggaran 2023 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sedangkan dalam pelaporan kode rekening pendapatan dan belanja yang digunakan dalam penganggaran dikonversi sesuai dengan Bagan Akun Standar pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa Laporan Keuangan Tahun 2023 yang kami sajikan ini masih belum sempurna, sehubungan dengan kondisi tersebut kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak, sebagai bahan penyempurnaan dalam penyusunan Laporan Keuangan Dinas Pariwisata DIY untuk periode yang akan datang.

Yogyakarta, Desember 2023

DINAS PARIWISATA

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPALA



SINGGIH RAHARJO, S.H., M.Ed.

NIP 196505141992031011